

## EVALUASI PENETAPAN KAWASAN ANDALAN DI SULAWESI SELATAN

**Muhammad Afies**

muhammad.afies99@gmail.com  
Universitas Negeri Makassar

**Sri Astuty**

sri.astuty@unm.ac.id  
Universitas Negeri Makassar

**Citra Ayni Kamaruddin**

citraayni@unm.ac.id  
Universitas Negeri Makassar

**Irwandi**

Irwandi@unm.ac.id  
Universitas Negeri Makassar

**Diah Retno Dwi Hastuti**

diah.retno@unm.ac.id  
Universitas Negeri Makassar

### ABSTRACT

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan penetapan kawasanandalan di Provinsi Sulawesi Selatan di lihat adari kriteria penetapannya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Berdasarkan hasil penelitian LQ dapat dilihat bahwa sektor lapangan usaha yang memiliki nilai  $LQ > 1$  berturut turut dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah : sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada Kota Maros, sektor transportasi dan pergudangan pada Kabupaten Bone, sektor jasa perusahaan pada Kabupaten Takalar, Sektor real estate pada Kota Parepare, sektor pertanian pada Kabupaten Bulukumba, sektor real estate pada Kabupaten Gowa dan sektor industri pengolahan pada Kota Makassar.

Keywords: kawasan andalan, location quotient, kebijakan pemerintah

### INTRODUCTION

Pembangunan perekonomian merupakan salah satu indikasi perkembangan suatu wilayah dalam mencapai kemajuan serta tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Namun pada kenyataannya, pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara maupun daerah sering tidak merata sehingga

dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan baik antar kabupaten dan kota, antar daerah, maupun antar kawasan. Memahami hal tersebut, sejak Repelita VI pemerintah berupaya mengalihkan pengertian pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041, pendekatan pembangunan wilayah dilaksanakan melalui penataan ruang. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan perencanaan. Penataan ruang yang merupakan penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang nasional dan provinsi ke dalam struktur dan pola tata ruang wilayah Sulawesi Selatan, inilah yang mengarah pada pembangunan yang lebih terorganisir di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut diharapkan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar daerah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (Kuncoro, 2014). Kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Kerusakan lingkungan akibat deforestasi, pertambangan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan degradasi ekosistem, sesuai dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan penurunan luas hutan. Selain itu, terdapat ketimpangan pembangunan yang signifikan antara daerah kabupaten kota dalam hal akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, seperti yang tercermin dalam data BPS yang menunjukkan kesenjangan ekonomi. Masalah pengangguran dan kemiskinan juga masih tinggi, dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan sebesar 9,37% pada tahun 2020 menurut BPS. Tantangan lain adalah menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan praktik pertanian yang tidak efisien, yang menyebabkan penurunan produktivitas di beberapa kawasan andalan.

Penetapan kawasan andalan ini diharapkan menjadi penggerak perekonomian wilayah dengan ciri kawasan yang lebih cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya. Sehingga untuk melihat ketepatan penetapan kawasan andalan pada di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari sisi

perekonomiannya, yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Per Kapita kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2018 – 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota				
		Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kep. Selayar	43,62	47,99	-1,78	4,02	3,67
2	Bulukumba	31,55	33,96	0,43	4,76	3,81
3	Bantaeng	41,63	46,84	0,52	8,86	15,45
4	Jeneponto	26,03	27,74	0,16	5,4	3,81
5	Takalar	31,51	34,42	-0,61	5,05	4,64
6	Gowa	25,07	27,50	1,76	7,26	4,59
7	Sinjai	41,88	45,05	1,55	5,23	4,87
8	Maros	60,92	64,60	-10,87	1,36	9,13
9	Pangkep	71,98	77,68	-1,69	3,46	4,93
10	Barru	38,09	41,80	0,87	4,77	5,11
11	Bone	43,87	47,81	-0,25	5,53	5,23
12	Soppeng	44,12	47,83	2,19	6,15	6,18
13	Wajo	47,15	49,31	-1,17	6,77	2,38
14	Sidrap	43,25	46,49	-0,59	5,54	4,86
15	Pinrang	48,29	52,10	0,44	5,04	4,52
16	Enrekang	32,81	35,28	1,25	6,36	3,71
17	Luwu	40,20	43,04	1,3	6,03	5,69
18	Tana Toraja	29,31	31,66	-0,28	5,19	5,12
19	Luwu Utara	38,65	41,65	-0,59	3,9	4,54
20	Luwu Timur	69,41	71,34	1,46	-1,39	1,99
21	Toraja Utara	37,84	41,08	0,17	4,05	5,27
22	Makassar	106,23	117,30	-1,27	4,47	5,4
23	Pare Pare	45,94	50,06	-0,08	4,41	5,93
24	Palopo	40,32	43,79	0,45	5,41	5,83
	SULAWESI					
	SELATAN	52,64	57,18	-0,71	4,64	5,09

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2022 dapat dilihat bahwa dari total 24 Kabupaten yang ada pada Provinsi Sulawesi

Selatan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017- 2022. Penurunan tertinggi terjadi pada Kabupaten Maros sebesar -10,87% disusul oleh Kabupaten Selayar sebesar -1,78%, Kota Makassar sebesar -1,27%, Kabupaten Wajo sebesar -1,17%, Kabupaten Pangkep -1,69%, Kabupaten Takalar sebesar -0,61%, Kabupaten Luwu Utara sebesar -0,59%, Kabupaten Toraja Utara sebesar -0,28%, dan Kota Pare-Pare sebesar -0,08%. Namun pada tahun 2021-2022 Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kota/Kabupaten mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi meskipun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan Kota/Kabupaten ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mewajibkan pemerintah memberikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) yang mengharuskan masyarakat untuk mengurangi kegiatan diluar rumah, tidak bepergian atau menghindari kerumunan sehingga masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu didalam rumah atau Work From Home (WFH). Akibat dari kebijakan ini membuat produksi barang dan jasa mengalami penurunan.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah lingkup penelitian ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan (SULSEL) yang mana membahas mengenai evaluasi penetapan kawasan andalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041 Tahun 2017-2037 yang dilihat dari kriteria penetapannya (laju pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah). Adapun periode dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2018 - 2022 dikarenakan adanya keterbatasan data yang ada di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **METHODS**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan, data PDRB tahun tahun 2017- 2022 atas dasar harga konstan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, karena peneliti ingin menjelaskan dan menganalisis mengenai suatu data dalam bentuk angka maupun hasil dari analisis Location Quotient (LQ). Data yang terkumpul akan diolah menggunakan metode analisis data Location Quotient (LQ) yang mana akan dijelaskan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data panel yang mana merupakan gabungan data time series selama 5 tahun dan data cross section sebanyak 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Location Quotient (LQ) adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi subsektor-subsektor unggulan atau ekonomi basis dari suatu wilayah. Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah secara optimal (Widodo, 2006).

Adapun rumus yang digunakan dalam analisis Static Location Quotient, sebagai berikut (Widodo, 2006).

$$SLQQ_{ik} = \frac{v_{ik}/v_k}{v_{ip}/v_p}$$

Dimana :

$V_{ik}$  = Nilai output (PDRB) sektor  $i$  daerah studi (kabupaten/kota) Dalam pembentukan PDRB daerah studi  $k$ .

$V_k$  = PDRB total di semua sektor di daerah studi  $k$ .

$V_{ip}$  = Nilai output (PDRB) sektor  $i$  daerah referensi  $p$  (provinsi) dalam pembentukan PDRB daerah referensi  $p$ .

$V_p$  = PDRB total di semua sektor di daerah referensi  $p$ .

Kriteria hasil penilaian yang diterapkan adalah sebagai berikut (Widodo, 2006) :

1. Nilai LQ disektor  $i > 1$ , berarti bahwa laju pertumbuhan sektor  $i$  di daerah studi  $k$  adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi
2. Dengan demikian, sektor  $i$  merupakan sektor unggulan daerah studi  $k$  sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi  $k$ .
3. Nilai LQ disektor  $i < 1$ , berarti bahwa laju pertumbuhan sektor  $i$  di daerah studi  $k$  adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi  $p$ . Dengan demikian, sektor  $i$  bukan merupakan sektor unggulan daerah studi  $k$  dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi  $k$ .
4. Nilai LQ disektor  $i = 1$ , berarti laju pertumbuhan sektor  $i$  di daerah studi  $k$  adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi  $p$ .

## RESULTS

Location Quotient (LQ) adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi unggulan atau ekonomi basis dari suatu wilayah. Dalam mengidentifikasi dan memastikan sektor ekonomi mana

bersifat basis maupun non-basis, analisis Location Quotient (LQ) telah banyak digunakan, mudah digunakan dan tidak membutuhkan data dalam jumlah besar untuk dilakukan. Berdasarkan definisi sektor basis adalah jenis kegiatan ekonomi yang menyediakan produk atau jasa yang menargetkan pasar internal dan eksternal dalam batas-batas ekonomi kabupaten dan kota. Berbeda dengan sektor non basis yang hanya sekedar menyajikan barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduk yang hidup pada batas-batas ekonomi dalam hal pembelian produk dan jasa. Kriteria penilaian yang digunakan dalam menentukan sektor basis dan non basis yaitu dapat dilihat dari:

1. Jika hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil analisis LQ pada salah satu sektor menunjukkan hasil lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Yang berarti bahwa peranan sektor tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut dan mampu mengekspor sebagian dari nilai tambah yang dihasilkannya ke wilayah diluar daerah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak perekonomian untuk daerah tersebut.
2. Jika hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil analisis LQ pada salah satu sektor menunjukkan hasil kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) maka sektor tersebut merupakan sektor non basis. Yang berarti bahwa peranan sektortersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut dan cenderung sering mengimpor dari wilayah lain sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak perekonomian untuk daerah tersebut.
3. Jika hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil analisis LQ pada salah satu sektor menunjukkan hasil sama dengan satu ( $LQ = 1$ ) maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Yang berarti bahwa peranan sektor tersebut sama dengan daerah acuan yang mana sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan di daerah bersangkutan dan tidak dapat melakukan ekspor sebagian nilai tambah yang dihasilkan sehingga tidakbisa dijadikan sebagai sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak perekonomian untuk daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa pada masing–masing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sektor basis atau sektor unggulan yang mana memiliki nilai LQ yaitu sebagai berikut:

Kota Makassar dapat diketahui bahwa dari 17 total jumlah sektor yang ada kecuali sektor pertambangan, hanya ada empat sektor saja yang memiliki nilai  $LQ < 1$  yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan 0,07, sektor pertambangan dan penggalian 0,01, pengadaan listrik dan gas 0,01, pengadaan air, sampah dan limbah daur ulang 0,01 artinya bahwas pada sektor tersebut bukan

termasuk sektor basis dan dinilai kurang potensial untuk dapat dikembangkan sehingga dapat menggerakkan perekonomian Kota Makassar.

Hasil dari perhitungan analisis Location Quotient (LQ) pada Kabupaten Maros bahwa terdapat 10 sektor basis atau unggulan yang memiliki  $LQ > 1$  sehingga dapat memenuhi perekonomian daerah dan dapat di ekspor keluar wilayah Kabupaten Maros yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor (1,26), sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (5,60), informasi dan komunikasi (4,55), sektor jasa keuangan (11,84) real estate (2,29), sektor jasa perusahaan (1,76) sektor administrasi dan jaminan sosial wajib (25,02), sektor jasa pendidikan (8,19), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,55) serta jasa lainnya (8,36) serta memiliki 7 sektor yang nilai  $LQ < 1$  yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan (0,02); pertambangan dan penggalian (0,05); industri pengolahan (0,04); pengadaan listrik dan gas (0,00); pengolahan air, sampah dan limbah daur ulang (0,00); serta jasa perusahaan (0,54) dimana sektor tersebut memerlukan impor dari luar wilayah kabupaten Maros.

Kabupaten Gowa memiliki 13 sektor yang memiliki nilai  $LQ > 1$  yaitu sektor pertanian, dan perikanan (4,60); pertambangan dan penggalian (2,25); industri pengolahan (2,06); konstruksi (1,02); perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (2,61) transportasi dan pergudangan (1,46); informasi dan komunikasi (5,31); jasa keuangan (2,16) real estate (7,10); administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial wajib (4,00); jasa pendidikan (2,69); jasa kesehatan kegiatan sosial (2,87) serta jasa lainnya (1,76) dimana sektor tersebut merupakan sektor basis serta memiliki 4 sektor non basis dimana  $LQ < 1$  pengadaan listrik, gas (0,01); pengelolaan air, sampah dan limbah daur ulang (0,00) dan jasa perusahaan (0,88).

Kabupaten Takalar memiliki 11 sektor yang nilai rata-rata  $LQ > 1$  atau merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Takalar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (7,88) pertambangan dan penggalian (1,04); industri pengolahan (1,78); perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (2,50); transportasi dan pergudangan (3,11) informasi dan komunikasi (1,96); jasa keuangan (1,34); real estate (7,10); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (4,00); serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,85). Dan memiliki 6 sektor yang nilai rata-rata  $LQ < 1$  atau merupakan non basis atau bukan sektor unggulan yaitu pengadaan listrik, gas (0,01); pengadaan air (0,00); konstruksi (0,66); penyediaan akomodasi makan minum (0,82) jasa pendidikan (0,84); dan jasa lainnya (0,59) Serta memiliki 1 sektor yang nilai LQ yg signifikan yaitu sektor jasa perusahaan (11,90); yang mana merupakan sektor yang sama dengan daerah acuan yang artinya sektor tersebut mampu

memenuhi kebutuhan di daerah lainnya dan Kabupaten Takalar sehingga perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan akan luar wilayah Kabupaten Takalar.

Kabupaten Bulukumba memiliki 13 sektor yang nilai rata-rata  $LQ > 1$  selama periode 2018-2022 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (6,28); pertambangan dan penggalian (1,37); industri pengolahan (2,17); perdagangan besar eceran, dan reparasi mobil dan motor (3,67); transportasi dan pergudangan (2,13); penyediaan akomodasi makan dan minum (1,67); informasi dan komunikasi (1,86); jasa keuangan (3,69); real estate (4,40); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (4,91) jasa pendidikan (1,84); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,79); jasa lainnya (2,11) yang mana merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang mana dapat menggerakkan perekonomian di Kabupaten Bulukumba dengan melakukan ekspor ke wilayah diluar Kabupaten Bulukumba. Dan memiliki nilai  $LQ < 1$  dan bukan merupakan sektor unggulan atau tergolong sektor non basis yaitu sektor pengadaan listrik (0,01); pengadaan air (0,00); konstruksi (0,87); jasa perusahaan (0,15).

Kabupaten Bone memiliki 10 sektor yang nilai rata-rata  $LQ > 1$  selama periode 2018-2022 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (7,71); pertambangan dan penggalian (1,97); industri pengolahan (2,25); transportasi dan pergudangan (11,17); penyediaan akomodasi makan dan minum (5,49); jasa keuangan (2,44); real estate (2,68); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,53) jasa pendidikan (1,51); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,71); yang mana merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang mana dapat menggerakkan perekonomian di Kabupaten Bone dengan melakukan ekspor ke wilayah diluar Kabupaten Bone. Dan memiliki nilai  $LQ < 1$  dan bukan merupakan sektor unggulan atau tergolong sektor non basis yaitu sektor pengadaan listrik (0,00); pengadaan air (0,00); konstruksi (0,94); perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor (0,67); jasa perusahaan (0,48); serta jasa lainnya (0,85).

Kota Parepare memiliki 13 sektor yang nilai rata-rata  $LQ > 1$  selama periode 2018-2022 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (1,05); konstruksi (1,30); perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor (3,70); transportasi dan pergudangan (5,53); penyediaan akomodasi makan dan minum (5,69); informasi dan komunikasi (3,35); jasa keuangan (7,96); real estate (9,11); jasa perusahaan (1,93); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (6,35) jasa pendidikan (3,90); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,92); serta jasa lainnya (7,00). yang mana merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang mana dapat menggerakkan perekonomian di Kota Parepare dengan melakukan ekspor ke wilayah diluar Kota Parepare. Dan memiliki nilai  $LQ < 1$  dan bukan merupakan sektor unggulan atau tergolong sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan

penggalian (0,15); industri pengolahan (0,68); pengadaan listrik gas (0,00); pengadaan air sampah dan limbah daur ulang.

Kota Palopo memiliki 12 sektor yang nilai rata-rata  $LQ > 1$  selama periode 2018-2022 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (2,63); konstruksi (1,36); perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor (5,71); transportasi dan pergudangan (5,49); penyediaan akomodasi makan dan minum (2,73); informasi dan komunikasi (2,86); jasa keuangan (7,15); real estate (9,114,42); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (5,35) jasa pendidikan (2,74); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (4,28); serta jasa lainnya (3,38). yang mana merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang mana dapat menggerakkan perekonomian di Kota Palopo dengan melakukan ekspor ke wilayah diluar Kota Palopo. Dan memiliki nilai  $LQ < 1$  dan bukan merupakan sektor unggulan atau tergolong sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,08); industri pengolahan (0,79); pengadaan listrik gas (0,00); pengadaan air sampah dan limbah daur ulang (0,01) seta jasa perusahaan (0,70).

## DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode LQ, menunjukkan bahwa Kabupaten Maros memiliki sektor basis atau unggulan tertinggi pada sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib di dibandingkan dengan kabupaten lainnya dimana sektor tersebut menjadi sektor basis atau unggulan sementara Kabupaten Bone memiliki sektor basis atau unggulan pada sektor transportasi dan pergudangan. Sementara Kota Parepare dan Kabupaten Gowa memiliki sektor unggulan di dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sektor real estate, Kota Palopo memiliki sektor unggulan atau sektor basis pada jasa keuangandan kota makassar memiliki sektor unggulan pada industri pengolahan yang mana sektor tersebut dapat di ekspor keluar dari wilayah Kota Makassar.

Terdapat dua sektor lainnya pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang merupakan sektor non basis yang memiliki rata – rata nilai location quotient ( $LQ < 1$ ) yang berarti bahwa sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan di dalam Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan. Ketidakmampuan ini membuat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan harus mengimpor dari daerah lainnya di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor non basis tersebut antara lain : (1). Sektor pengadaan listrik dan gas (2). Pengadaan air, sampah dan limbah daur ulang.

## CONCLUSIONS

Kesimpulan berikut dapat di tarik berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui sektor unggulan pada Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 - 2022

1. Berdasarkan hasil penelitian LQ dapat dilihat bahwa sektor lapangan usaha yang memiliki nilai  $LQ > 1$  berturut turut dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah : sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada Kota Maros, sektor transportasi dan pergudangan pada Kabupaten Bone, sektor jasa perusahaan pada Kabupaten Takalar, Sektor real estate pada Kota Parepare, sektor pertanian pada Kabupaten Bulukumba, sektor real estate pada Kabupaten Gowa dan sektor industri pengolahan pada Kota Makassar.
2. Berdasarkan hasil analisis mengenai Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan analisi LQ dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kawasan andalan berdasarkan kriteria penetapannya hanya dilihat dari laju pertumbuhan PDRB dan sektor unggulan yang ditunjukkan oleh hasil analisis Location Quotient (LQ).

#### REFERENCES

- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.
- Asyabri, Y., & Syafril, S. (2018). Pengembangan Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(1), 27-38.
- BPS Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2022 (dalam juta rupiah).
- Hariyanti, E., & Rendra, M. I. (2022). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Sektor Ekonomi Unggulan di Kawasan Wanarakuti. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(1), 1-12.
- Hasyim, F., Subagio, H., & Darmawan, M. (2016). One map policy (OMP) implementation strategy to accelerate mapping of regional spatial planing (RTRW) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 37, No. 1, p. 012054). IOP Publishing.
- Ma'rifah, A. N. (2017). *Struktur Perekonomian Dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendekatanlocation Quotient Dan Shift-Share Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Maulana, A. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 1-6.

- Nuraini, R. A., & Setiartiti, L. (2017). Strategi pengembangan kota Magelang sebagai kawasan andalan di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(2), 173-182.
- Rahman, A., & Minanda, C. (2021). Penentuan Kawasan Andalan di Kalimantan Barat Menggunakan Metode KOG (Tipologi Klassen, Analisis Overlay, dan Indeks Gravitasi): Determination of Key Areas in West Kalimantan by Using the KOG Method (Klassen Typology, Overlay Analysis, and Gravity Index). In *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)* (Vol. 1, No. 1, pp. 46-57).
- Suryaputra, F. (2019). Analisis Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Tahun 2010-2016 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember).
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.